

## PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN *ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND* *GOVERNANCE (ESG)*

(Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
Tahun 2015 - 2021)

Kevin Nicholas Sirait, Fuad<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

### ABSTRACT

*This study aims to test and find empirical evidence of the effect of corporate governance on ESG disclosure. The corporate governance attributes include institutional ownership, board size, gender diversity, proportion of independent commissioners, and size of the committee audit. The control variables in this study include firm size, leverage, and profitability. The Bloomberg database's ESG rating serves as a measure of the dependent variable, ESG disclosures. The population of this study uses non-financial companies listed on the IDX from 2015 to 2021. Total sample use amounted to 545, which was determined through purposive sampling with various criteria. The analysis method used is panel data regression, considering the number of companies and years of observation used in this study. The results of this study show that the proportion of independent commissioners has a positive effect on ESG, and institutional ownership has a negative effect on ESG. Meanwhile, other attributes have no relationship to ESG disclosure.*

*Keywords: corporate governance, institutional ownership, board size, gender diversity, independent commissioner, size of committee audit, ESG disclosure.*

### PENDAHULUAN

Entitas bisnis berdedikasi terhadap tujuan serta sasaran yang terukur dan terarah, seperti meraih keuntungan finansial yang maksimal melalui aktivitas operasi dari bisnisnya. Seiring berjalannya waktu, perusahaan juga saat ini dituntut untuk mampu menjaga keberlangsungan serta kesinambungan usahanya dalam jangka panjang. Menurut Scholtens (2008), keberlangsungan perusahaan sangat bergantung pada relasi yang tercipta dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Elkington (1997) menjelaskan konsep *triple bottom line* yang menegaskan, selain berupaya mendapatkan keuntungan finansial (*profit*), perusahaan harus proaktif dalam berkontribusi terhadap masyarakat (*people*) dan ikut serta dalam pelestarian lingkungan (*planet*) agar dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya. Mengedapankan praktik bisnis dengan mengimplementasikan aspek keberlanjutan dalam bisnis harus dilakukan oleh perusahaan.

Sejak dicetuskannya pelaporan global inisiatif (GRI) tahun 2001, perusahaan semakin sadar untuk melaporkan tanggung jawab sosialnya sehingga mendorong cakupan pelaporan tanggung jawab sosial yang semakin luas, termasuk di dalamnya informasi mengenai pengungkapan lingkungan dan tata kelola (Elilli,2023). Isu pemanasan global serta pandemi COVID -19 menyebabkan banyaknya ketidakpastian sehingga pelaporan ini semakin relevan. Sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan tersebut, maka lahirlah sebuah konsep keberlanjutan yang dikenal dengan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*.

Konsep terkait ESG mulai mendapat perhatian sejak munculnya program *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dicetuskan oleh United Nations tahun 2015. Selain menjadi standar dalam mengukur kinerja keberlanjutan perusahaan, pengungkapan ESG saat ini merupakan salah satu sarana penting yang dinilai mendorong kinerja perusahaan. Penelitian Oxford University dari tahun 2016 menjelaskan bahwa perusahaan dengan pengungkapan ESG mampu menaikkan kinerja hingga 88 % bahkan menaikkan harga saham sebesar 80 % (Alfaruq, 2021). Anggapan ini

---

<sup>1</sup> Corresponding author

tidak terlepas bahwa ESG merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas sebagai strategi dalam mendorong reputasi dan citra perusahaan, yang akan berdampak pada aktivitas manajemen serta kinerja keuangan perusahaan pada masa mendatang (Velte,2017).

Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya dalam membentuk strategi dalam implementasi prinsip – prinsip ESG, seperti berafiliasi dengan Sustainable Stock Exchange (SSE) dan melahirkan empat indeks bursa, yaitu Sri Kehati, IDX ESG Leaders, IDX Sector Leaders (Sri Kehati), dan IDX Kehati Quality 45 (IDX Kehati), yang salah satu dari keempat indeks ini bekerja sama dengan Sustainalytics, sebuah badan riset ESG dan tata kelola terkemuka. Kemudian, mendukung Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures/TCFD) (Market.bisnis.com,2021). Melalui OJK, pemerintah mengeluarkan POJK 51 Tahun 2017 guna mendorong pengungkapan keberlanjutan.

Terlepas kerasnya upaya pemerintah dalam mendorong penerapan ESG, banyak perusahaan di Indonesia yang belum mengimplementasikannya secara efektif. Berdasarkan survei Dewan Bisnis Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan tahun 2021 menjelaskan, indeks ESG Indonesia berada pada posisi 36 diantara 47 dibawah negara tetangga lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan India. Survei lain pada lembaga yang sama, mengindikasikan bahwa 40 % perusahaan di Indonesia belum menyadari pentingnya ESG. Hal ini tercermin dari data *Bloomberg* yang menunjukkan minimnya perusahaan dengan data ESG.

Pelanggaran terhadap dimensi ESG, juga mendukung adanya pemahaman serta perhatian yang rendah oleh perusahaan terhadap isu ini. Berkaitan dengan lingkungan tahun 2019 PT Indofood membiarkan limbah berbahaya dan beracun (B3) tercecer sembarangan (Media Indonesia,2019). Melalui Aspek sosial, PT Pan Brothers melakukan pemotongan gaji dan tunjangan hari raya (THR) secara sehipak (CNBC Indonesia, 2021). Terkait dimensi tata kelola, PT Hanson International menyajikan laporan keuangan dengan kesalahan material hingga 613 miliar rupiah (Kompas.com, 2020). Belum lagi, Indonesia juga digemparkan dengan kasus pencemaran lingkungan di Jabodetabek, khususnya DKI Jakarta. Menurut Dirjen Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Sigit Reliantoro, selain emisi gas kendaraan, kegiatan industri dan pembangkit listrik menjadi salah satu penyumbang polusi Jakarta.

Dengan adanya pelanggaran yang terjadi, menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan atas operasi perusahaan sehingga mereka seringkali menuntut perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi terutama yang berkaitan dengan kinerja keberlanjutan. Kegiatan pengungkapan dipengaruhi oleh banyak hal dan tata kelola adalah salah satunya (Utama *et al.*, 2020). Penerapan tata kelola yang baik mendorong perusahaan dalam menjalankan transparansi serta akuntabilitas yang diwujudkan melalui informasi keberlanjutan (Ningrum dan Prihatiningtas, 2015). Melalui hal tersebut, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau aktivitas perusahaan khususnya berkaitan dengan kinerja keberlanjutan dan mitigasi risiko sehingga mengurangi asimetri informasi (Cui *et al.*,2018).

Terdapat dua mekanisme yang memfasilitasi penerapan tata kelola perusahaan, yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal dilaksanakan oleh struktur kepemilikan, direksi, komisaris dan komite audit, disisi lain mekanisme eksternal dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan aturan hukum yang berlaku (Denis & McConnell, 2003). Indonesia menganut sistem *two - tier* yang berarti terdapat pemisahan antara dewan pengawas dan pelaksana, yaitu pengawas (komisaris) dan pelaksana (direksi).

Peneliti tertarik untuk mengkaji kembali hubungan antara *corporate governance* dan pengungkapan ESG karena hasil penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi. Penelitian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari riset Ellili (2023) dengan menambahkan variabel ukuran komite audit sebagai salah satu atribut *corporate governance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan dan literasi terkait topik hubungan *corporate governance* dan pengungkapan ESG yang masih jarang diteliti, terutama di Indonesia. Peneliti akan melaksanakan studi empiris pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021 guna menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan ESG. Pengukuran variabel *corporate governance* mencakup kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, diversitas gender, proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### Teori Agensi (*Agency Theory*)

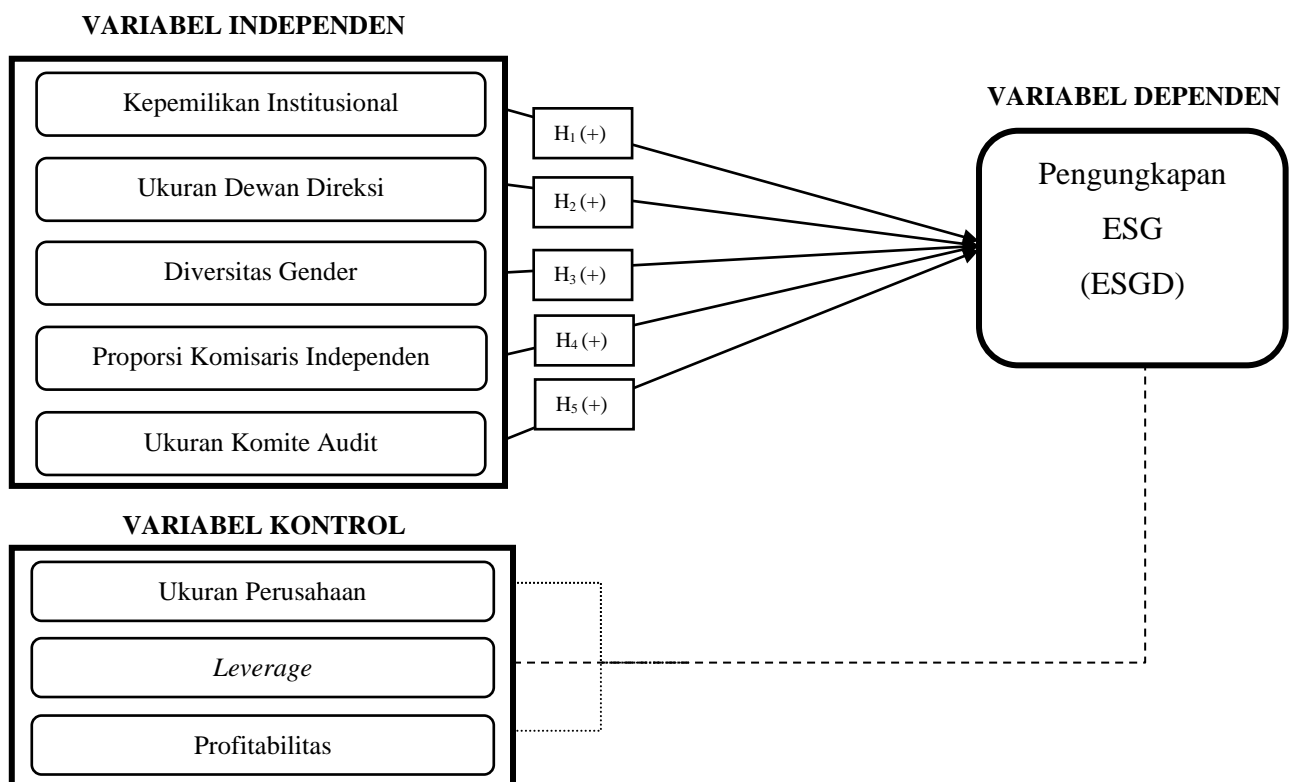
Teori agensi (*agency theory*) umumnya digunakan sebagai landasan teoritis terkait konteks pengelolaan atau manajemen perusahaan (Jensen and Meckling, 1976). Teori ini mengenal dua aspek yang saling berkaitan, yaitu manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Pemegang saham secara tidak langsung menjalankan operasional perusahaan sehingga mereka merekrut manajer (*agent*) guna mengelola sumber daya serta ikut serta terhadap aktivitas operasional perusahaan dilandaskan pada keinginan *principal*. Pada dasarnya kedua pihak ini merupakan individu rasional (*rational economic man*) yang memiliki keinginan atau motivasi pribadi (Ghozali, 2020). Hal ini seringkali mendorong manajer mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan dirinya dan mengabaikan kepentingan pemegang saham (*self-interest*). Agen memahami bahwa mereka memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal sehingga melalui hal tersebut memunculkan adanya *moral hazard* dan *adverse selection* (Ghozali, 2020).

Prinsipal dapat menciptakan mekanisme untuk mengawasi kinerja agen (monitoring) atau memberikan sejumlah insentif berdasarkan kinerja agen (insentif) sebagai upaya untuk mengatasi masalah keagenan (Ghozali, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, salah satu caranya adalah dengan membentuk struktur tata kelola perusahaan. Teori agensi merupakan dasar untuk pemahaman yang komprehensif tentang tata kelola perusahaan. Pendapat disampaikan oleh Chen *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa teori ini dapat dikatakan “matang” dalam menjelaskan mengenai pelaksanaan mekanisme tata kelola perusahaan, hak milik, kinerja perusahaan dan organisasi. Agen dan pemilik dapat mendamaikan kepentingan mereka yang berbeda melalui penerapan tata kelola perusahaan yang efektif. Tata kelola perusahaan yang baik menganut prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Pengungkapan informasi keberlanjutan, seperti ESG merupakan sarana transparansi dan akuntabilitas bagi perusahaan terkait kinerja keberlanjutan dan mekanisme mitigasi risiko yang dapat dipertanggungjawabkan pada para pemangku kepentingan.

### Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan ESG**

Kepemilikan institusional merujuk pada tingkat saham yang dimiliki oleh institusi keuangan, seperti perbankan, dana asuransi, serta institusi keuangan lainnya. Melalui sumber daya besar yang dimilikinya, institusi sering kali menjadi kepemilikan saham terbesar di perusahaan sehingga mereka mampu dalam melakukan mempengaruhi dan memonitoring aktivitas manajemen salah satunya mendorong tingkat pengungkapan (Zaid *et al.*, 2020). Berdasarkan perspektif teori agensi, kepemilikan institusional dapat dijadikan alat guna mengurangi adanya *agency problem* dengan peningkatan pengawasan yang lebih efektif, seiring peningkatan jumlah investor institusional (Sakawa, *et al.*, 2021). Menurut Ellili (2023), investor institusi saat ini tidak hanya berfokus kepada kinerja keuangan, melainkan bagaimana perusahaan menerapkan bisnis dengan berorientasi pada kepentingan para pemangku kepentingan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi keberlanjutan, seperti ESG guna mengurangi asimetri informasi.

Selain Ellili (2023), telah terdapat beberapa riset yang meneliti mengenai hubungan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan keberlanjutan. (Zaid *et al.*, 2020), menjelaskan keberadaan kepemilikan institusional mendorong adanya pengungkapan CSR dan (Chen *et al.* 2019) mengatakan bahwa keberadaan investor institusi akan menekan manajemen dalam meningkatkan pelaksanaan CSR dan pengungkapan dalam *annual report*. Namun, Qa'dan dan Suwaidan (2019); Rosalinawati dan Januarti (2021) menjelaskan bahwa keberadaan kepemilikan institusional menurunkan pengungkapan ESG. Timbulnya inkonsistensi hasil penelitian, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian:

**H1:** Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG

### **Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan ESG**

Ukuran dewan direksi merupakan salah satu karakteristik direksi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan. Ukuran direksi yang lebih besar dapat meningkatkan pengawasan dan pengungkapan untuk menghindari asimetri informasi (Husted dan Filho, 2019). Lebih lanjut, Birindelli *et al.*, (2018) dan Ismail *et al.*, (2019) menjelaskan jumlah banyaknya direksi menggambarkan keragaman latar belakang serta pengetahuan sehingga mendorong peningkatan tingkat kualitas pengambilan keputusan, salah satunya berhubungan dengan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Utama *et al.*, (2020) menjabarkan bahwa jumlah direksi yang besar dihubungkan dengan semakin banyaknya fungsi yang dapat dilakukan sehingga hal ini bisa mendorong manajemen untuk dapat mengawasi setiap keputusan yang dibuatnya agar sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Keterkaitan ukuran direksi terhadap pengungkapan ESG, telah dilakukan juga oleh Gurol dan Lagasio (2022); Suttipun (2021); Husted dan Filho (2019), menyatakan jumlah direksi yang signifikan akan meningkatkan luas pengungkapan ESG. Di sisi lain, ukuran direksi yang terlalu besar justru menurunkan kualitas keputusan dan menyebabkan miskomunikasi (Elilli, 2023). Oleh karena inkonsistensi hasil sebelumnya, peneliti tertarik melakukan riset lebih lanjut dengan mengusung hipotesis:

**H2:** Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG

### **Pengaruh Diversitas Gender terhadap Pengungkapan ESG**

Diversitas gender mengacu pada perbedaan komposisi pria dan wanita dalam organisasi (Kartikasari dan Mutmainah, 2013). Perbedaan gender berdampak pada proses pengambilan keputusan (Na dan Hong, 2017). Perempuan dikenal memiliki fokus dan tertarik terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan isu sosial, sedangkan pria umumnya berfokus kepada pencapaian finansial (Singh *et al.*, 2008). Melalui perbedaan inilah, mendorong perempuan untuk berempati lebih besar terhadap isu terkait pemangku kepentingan dan praktik keberlanjutan (Birindelli *et al.*, 2018).

Keterkaitan terhadap teori agensi menjelaskan, keikutsertaan wanita dalam perusahaan akan mendorong adanya komunikasi melalui pengungkapan keberlanjutan agar menekan asimetri informasi atas aktivitas yang dilakukan (Zhang *et al.*, 2013). Dengan demikian, perusahaan dengan jumlah direksi perempuan yang lebih besar akan membantu mengarahkan kebijakan perusahaan dalam mendorong kegiatan ESG dan melakukan pengungkapan pada laporan tahunan (Arraysi *et*

*al.*,2020). Penelitian dilakukan oleh Bear *et al.*, (2010) mengungkapkan bahwa skor CSR perusahaan biasanya meningkat dengan partisipasi wanita yang lebih besar di dewan. Penelitian yang dilakukan Ellili (2023); Suttipun (2021); Arayssi *et al.*, (2020) mengungkapkan keberadaan wanita dalam direksi meningkatkan pengungkapan ESG.

Disisi lain Kolsi dan Muqattash, (2021); Halid, *et al.*, (2022), mengungkapkan tidak berpengaruh dan Husted dan Sousa- Filho (2019) menyatakan pengaruh negatif. Ini menjelaskan bahwa keberadaan direksi perempuan tidak berpengaruh dikarenakan jumlah yang kecil didukung dengan budaya patriarki yang kuat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menarik hipotesis:

**H3:** Diversitas gender berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG

#### **Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan ESG**

Komisaris independen tidak memiliki hubungan apapun baik keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham serta hubungan dengan kekeluargaan bersama komisaris, direksi, pemegang saham maupun pihak manapun di dalam perusahaan yang mampu mempengaruhi kemampuannya bertindak secara independen. Teori agensi menjelaskan bahwa melalui peningkatan proporsi dewan komisaris independen akan meningkatkan kualitas pengawasan yang berdampak pada peningkatan pada kualitas dan kelengkapan pengungkapan (Khomsiyah,2005). Sejalan dengan hal ini melalui pengawasan yang efektif akan mendorong manajemen dalam memotivasi untuk mengungkapkan informasi lebih banyak kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya (Ellili,2023).

Komisaris independen mendorong adanya transparansi melalui pengungkapan ESG sebagai salah satu sarana komunikasi bahwa perusahaan mampu menyeimbangkan kinerja bisnis bersama dengan kinerja keberlanjutannya. Didukung oleh Arayssi *et al.*, (2020); Adiasih *et al.*, (2018); Ellili (2023) yang mengatakan keberadaan komisaris independen akan mendorong pengungkapan ESG sebagai bentuk transparansi atas kinerja perusahaan yang memperhatikan unsur sosial dan lingkungan. Namun, pendapat lain disampaikan oleh Rahmadani *et al.*, (2023) bahwa tidak ada pengaruh keberadaan komisaris independen terhadap pengungkapan ESG. Adanya inkonsistensi penelitian sehingga penulis merumuskan hipotesis:

**H4:** Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG

#### **Pengaruh Ukuran Komite Audit Independen terhadap Pengungkapan ESG**

Perkembangan yang pesat pada proses bisnis saat ini mendorong peran komite audit bukan hanya berfokus terhadap aspek finansial melainkan juga pelaporan non finansial seperti laporan non keuangan dan risiko manajemen (Ahmed Haji dan Anifowose, 2016). Ukuran komite audit menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi kualitas kinerja dari komite audit (Hoitash *et al.*, 2009). Teori agensi mengungkapkan bahwa jumlah signifikan yang dimiliki oleh komite audit akan membantu mendorong mekanisme pengawasan internal, salah satunya mengungkapkan informasi yang lebih luas. Menurut Bedard dan Gendron (dikutip oleh Buallay dan Aldhaen, 2018), ukuran komite audit yang besar menunjukkan bahwa komite audit tersebut akan diisi oleh pihak – pihak yang memiliki pengetahuan serta latar belakang, keterampilan, sudut pandang sehingga mendorong adanya pemantauan yang lebih efektif. Allegrini dan Greco (2013) menyatakan jumlah yang signifikan menandakan terdapat banyaknya sumber daya yang dimiliki komite audit untuk dapat menjangkau lebih banyak fungsi pengawasan sehingga membantu memecahkan masalah dan dilema dalam proses pelaporan perusahaan terutama dalam pelaporan non keuangan (Persons 2009). Riset yang dikeluarkan oleh A. Buallay dan Al-Ajmi, (2020) dan Buallay dan Aldhaen, (2018) mengungkapkan bahwa semakin signifikan jumlah komite audit meningkatkan pengungkapan ESG.

Disisi lain Biçer dan Feneir, (2019) ; Haji dan Anifowose, (2016) ; Jimantoro, *et al.*, (2023) mengungkapkan bahwa pengungkapan keberlanjutan seperti ESG tidak dipengaruhi oleh jumlah komite audit. Pendapat lain disampaikan Suttipun (2021) bahwa jumlah komite audit yang besar akan mengurangi pengungkapan ESG. Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis merumuskan

**H5:** Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG

**METODE PENELITIAN**

**Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan pada riset ini adalah perusahaan non keuangan yang terindeks BEI antara 2015 – 2021. *Purposive sampling* diaplikasikan untuk memilih sampel dari populasi. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Sekaran dan Bougie, 2017). Berikut kriteria yang digunakan dalam memilih sampel, diantaranya:

1. Perusahaan non keuangan yang listing pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2021.
2. Perusahaan non keuangan yang memiliki data *ESG Disclosure Score* selama tahun 2015 – 2021 pada platform *Bloomberg*.
3. Perusahaan mengungkapkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian pada laporan tahunan 2015 hingga 2021.

**Variabel dan Pengukurannya**

Penelitian ini mengoperasikan tiga jenis variabel yaitu variabel dependen, independen dan kontrol. *ESG disclosure score* yang berasal dari *database Bloomberg* menjadi variabel dependen, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, diversitas gender, proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit. Ukuran Perusahaan, *leverage* dan profitabilitas digunakan menjadi variabel kontrol. Guna menjelaskan lebih dalam mengenai variabel yang dioperasikan, maka akan dipaparkan dalam tabel dibawah.

**Tabel 1**  
**Variabel dan Operasionalnya**

Variabel	Notasi	Pengukuran
<b>Variabel Independen</b>		
Pengungkapan ESG	ESGD	ESG score yang dikeluarkan oleh Bloomberg. Range skor terdiri dari 0 sampai 100.
<b>Variabel Dependen</b>		
Kepemilikan Institusional	INST	Saham milik institusi / total saham beredar
Ukuran Dewan Direksi	BSIZE	Jumlah dewan direksi dalam perusahaan
Diversitas Gender	BDIV	(Total direksi perempuan/total dewan direksi) x 100 %
Proporsi Komisaris Independen	INC	Total komisaris independen/total keseluruhan dewan komisaris
Ukuran Komite Audit	ACSIZE	Jumlah komite audit dalam perusahaan
<b>Variabel Kontrol</b>		
Ukuran Perusahaan	SIZE	$Ln (Total Aset)$
Leverage	LEV	Laba (rugi) Tahun berjalan/ Total aset
Profitabilitas	ROA	Total liabilitas/ total aset

**Model Penelitian**

Analisis regresi data panel dengan jenis *unbalanced data panel*. Terdapat tiga model regresi yang biasa digunakan dalam regresi data panel, yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM) yang sebelumnya dipilih dengan uji pemilihan model (uji *chow*, uji *hausman*, uji *lagrange multiplier*). Pada penelitian ini terpilih model *fixed effect model* (FEM) sehingga model regresi yang terpilih dijabarkan sebagai berikut:

$$ESGD\ Score = \beta_0 + \beta_1INST + \beta_2SIZE + \beta_3BDIV + \beta_4INB + \beta_5ACSIZE + \beta_6FSIZE + \beta_7LEV + \beta_8ROA + \varepsilon$$

Keterangan:

ESGD : Skor *Environment Social Governance Disclosure*

$\beta_0$	: Koefisien Regresi Data Panel
$\beta_{1-5}$	: Koefisien Variabel Independen
$\beta_{6-8}$	: Koefisien Variabel Kontrol
INST	: Kepemilikan Institusional
BSIZE	: Ukuran Dewan Direksi
BDIV	: Diversitas Gender
INB	: Proporsi Dewan Komisaris Independen
FSIZE	: Ukuran Perusahaan
LEV	: <i>Leverage</i>
ROA	: <i>Return On Asset</i>
$\varepsilon$	: <i>Error</i>

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan pemilihan sampel dan hasil temuan atas pengolahan data dengan mengoperasikan aplikasi STATA 17 yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji signifikansi model, uji asumsi klasik dan analisis regresi data panel dengan *robust standard error*.

#### Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari laporan tahunan dan Bloomberg *terminal* Undip. Populasi yang digunakan terdiri dari atas perusahaan non keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015 – 2021. Metode *purposive sampling* diaplikasikan dalam penentuan sampel. Berikut penjabaran data yang digunakan dalam penelitian, diantaranya:

**Tabel 2**  
**Hasil Pemilihan Sampel Penelitian**

Kriteria	Jumlah Sampel
Jumlah Perusahaan non keuangan terindeks BEI selama 2015 - 2021 (768 x 7)	5,376
Sampel perusahaan non keuangan yang tidak memiliki data ESG <i>disclosure score</i> pada Bloomberg terminal tahun 2015 – 2021	(4,831)
Sampel yang tidak mengungkapkan variabel penelitian tahun 2015 - 2021	(0)
<b>Total sampel penelitian (88 perusahaan)</b>	<b>545</b>

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2023

**Tabel 3**  
**Distribusi Sampel Penelitian**

Sektor	Persentase	Jumlah Perusahaan	Total Jumlah Tahun Observasi
Energi	12.50	11	71
Barang Baku	17.05	15	93
Perindustrian	5.68	5	35
Konsumen Primer	19.32	17	100
Konsumen Non Primer	13.64	12	74
Kesehatan	5.68	5	35
Properti dan Real Estate	10.23	9	57
Teknologi	3.41	3	9
Infrastruktur	12.50	11	71
Transportasi dan Logistik	0.00	0	0
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>88</b>	<b>545</b>

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2023

Berdasarkan data distribusi sampel menunjukkan bahwa dari seluruh sektor pada perusahaan non keuangan yang memiliki skor pengungkapan ESG, sektor konsumen primer memiliki persentase tertinggi yaitu 19.32 % dan sektor transportasi dan logistik memiliki persentase terendah yaitu 0.00 % atau tidak ada perusahaan yang melakukan pengungkapan ESG.

### Statistik Deskriptif

**Tabel 4**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	Obs	Mean	SD	Min	Max
ESGD	545	36,99505	12,16473	8,68	73,87
INST	545	0,3771653	0,3069575	0	0,926608
BFSIZE	545	6,392661	1,897159	2	14
BDIV	545	0,1325729	0,1762962	0	0,6666667
INC	545	0,4254612	0,1227932	0,2857143	1
ACSIZE	545	3,225688	0,5707972	3	7
SIZE	545	30,73372	1,094453	27,07602	33,53723
LEV	545	0,2642221	0,1699195	0,006	0,6028
ROA	545	0,0547559	0,0625373	-0,0477	0,2019

Sumber: Output *Software STATA 17*, data sekunder yang diolah tahun 2023

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4 menjelaskan mengenai deskripsi data yang digunakan pada penelitian ini diantaranya rata – rata, standar deviasi, nilai minimum hingga nilai maksimum. Pengungkapan ESG (ESGD) sebagai variabel dependen menunjukkan dari 88 perusahaan atau 545 sampel, nilai rata – rata ESG sebesar 36.99505. Standar deviasi menunjukkan angka 12,1643 dibawah rata – rata yang mengindikasikan bahwa persebaran data ESGD cenderung merata dan tidak beragam. Rentang nilai yang tersaji pada variabel ini adalah 8.68 (min) dan 73.87 (max).

Kepemilikan institusional (INST) menunjukkan bahwa rata – rata dari 88 perusahaan atau 545 sampel adalah 0.3771653 atau 38 % dengan nilai standar deviasi sebesar 0.3069575 atau 31 % yang mengindikasikan persebaran data kepemilikan institusional cenderung merata. Rentang nilai didapatkan berkisar 0 sampai 0.92660, yang mengindikasikan bahwa dari 88 perusahaan terdapat perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan institusional dan terdapat perusahaan dengan kepemilikan institusional sebesar 93 %.

Ukuran dewan direksi (BFSIZE), menunjukkan bahwa dari 88 perusahaan atau 545 sampel, menunjukkan nilai rata – rata memiliki nilai sebesar 6.392661 atau 6 orang dewan direksi. Ini mengindikasikan bahwa melalui rata – rata perusahaan sampel secara telah mengikuti peraturan POJK 33, yaitu minimal 2 orang. Standar deviasi menunjukkan angka 1.897159 yang mengindikasikan variasi yang tidak beragam. Statistik deskriptif juga menggambarkan bahwa perusahaan sampel memiliki paling kecil 2 orang direksi dalam jajaran dan paling besar sebanyak 14 orang.

Rata – rata sebesar 0.1325729 yang menunjukkan bahwa rata – rata diversitas gender (BDIV) dalam sampel sebanyak 13 %. Persebaran data melalui standar deviasi menunjukkan angka 0.1762962 yang mengindikasikan bahwa variasi data tinggi. Rentang nilai didapatkan berkisar 0 sampai 0.6666667 yang mengindikasikan terdapat perusahaan yang tidak memiliki direksi perempuan dan terdapat perusahaan yang 67% dari jajaran direksi diisi oleh perempuan.

Menunjukkan nilai rata – rata sebesar 0.4254612, mengindikasikan bahwa perusahaan sampel memiliki rata – rata persentase 43 % dewan komisaris independen (INC) dari jumlah



seluruh komisaris. Melalui rata – rata mengindikasikan bahwa perusahaan sampel telah mengikuti POJK 33 yang mensyaratkan perusahaan memiliki 1 dewan komisaris independen atau 30 % jika lebih dari 2 orang komisaris. Nilai standar deviasi menunjukkan nilai 0.1227932 yang menunjukkan nilai komisaris independen memiliki variasi data yang rendah. Melalui nilai min dan max disimpulkan bahwa terdapat perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen sebesar 0.2857143 atau 28% dan tertinggi sebesar 1 atau 100 %.

Faktor ukuran komite audit (ACSIZE) menunjukkan nilai rata – rata sebesar 3.225688 yang mengindikasikan rata – rata perusahaan sampel memiliki 3 komite audit dan ini memenuhi syarat POJK 55, yaitu minimal perusahaan memiliki 3 komite audit. Standar deviasi sebesar 0.5707972 yang menjelaskan variabilitas rendah. Rentang nilai dari 3 hingga 7, menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang memiliki 3 komite audit dan paling besar adalah 7 orang.

**Hasil Uji Hipotesis**

**Tabel 5**  
**Regresi data Panel dengan Robust Standard Error**

ESGD	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]
INST	-5.689	2.336	-2.44	.017	-10.331	-1.047
BFSIZE	.194	.456	0.43	.671	-.711	1.1
BDIV	10.534	5.495	1.92	.059	-.387	21.455
INC	10.943	5.448	2.01	.048	.114	21.772
ACSIZE	1.42	1.414	1.00	.318	-1.389	4.23
SIZE	15.364	1.777	8.64	0	11.831	18.897
LEV	-13.813	6.486	-2.13	.036	-26.704	-.922
ROA	-15.269	7.974	-1.91	.059	-31.119	.58
Constant	-440.441	53.077	-8.30	0	-545.938	-334.945
Mean dependent var		36.995	SD dependent var		12.165	
R-squared		0.382	Number of obs		545	
F-test		16.844	Prob > F		0.000	
Akaike crit. (AIC)		3303.594	Bayesian crit. (BIC)		3338.001	

Sumber: Output *Software* STATA 17, data sekunder yang diolah tahun 2023

Melalui tabel 5, dapat dilihat hasil pengujian hipotesis berupa uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji statistik f dan uji t, dengan penjabaran diantaranya:

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Berdasarkan hasil regresi menggunakan model *fixed effect model* (FEM) yang telah di *robust standard error*, didapatkan nilai  $r^2$  sebesar 0.382 atau 38,2 %, variabel independen dan kontrol dapat menjelaskan pengungkapan ESG (dependen). Sementara itu, terdapat nilai 0,618 atau 61.8% sisanya dipresentasikan faktor lain di luar variabel yang dipakai.

**Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Hasil regresi yang telah di *robust standard error* menunjukkan semua variabel (independen dan kontrol) secara bersama, berhasil mempengaruhi variabel terikat. Indikasi dibuktikan melalui uji F yang menunjukkan nilai 0.0000 dan model ini sah untuk digunakan dalam penelitian.

**Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji  $t - test$ )**

Melalui uji  $t - test$  melihat secara parsial variabel independen terhadap dependen (Ghozali dan Ratmono,2017), variabel dikatakan berpengaruh apabila didapatkan nilai sig <0.05.

**PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

**Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan ESG**

Berdasarkan *output* pada tabel 5 didapatkan hasil jika variabel kepemilikan institusional memperoleh nilai sig sebesar 0.017 dengan nilai t value sebesar -2.44, yang mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional **berpengaruh negatif signifikan** atau dengan adanya kepemilikan institusional menurunkan pengungkapan ESG sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) **ditolak**.

Berdasarkan teori agensi keberadaan kepemilikan institusional diharapkan mendorong monitoring terhadap keputusan manajemen, mengingat jumlahnya yang besar dan seringkali mendominasi sehingga pihak institusi memiliki *power* guna mendorong kebijakan salah satunya pengungkapan keberlanjutan. Hal ini tidak terlepas demi memitigasi adanya asimetri informasi antara *agen dan principal* (Elilli, 2023).

Hasil ini didukung oleh riset Qa'dan dan Suwaidan (2019) ; Rosalinawati dan Januarti (2021). Terdapat dua alasan yang dapat menggambarkan alasan investor institusi kurang mendukung adanya pengungkapan keberlanjutan dikarenakan dua hal yang berkaitan, pertama institusi mungkin lebih berfokus terhadap kinerja jangka pendek perusahaan (kentungan) daripada inisiatif keberlanjutan yang merupakan rencana jangka panjang sehingga mereka akan lebih berfokus kepada hal yang dapat dikendalikan dibandingkan dengan aktivitas jangka panjang yang sifatnya tidak pasti. Menurut (Rosalinawati dan Januarti, 2021), masyarakat Indonesia mulai memiliki ketertarikan terhadap dunia investasi. Akan tetapi diakibatkan dengan pengetahuan yang minim, maka mereka cenderung untuk menempatkan dana yang dimiliki pada manajer investasi dan menginginkan untuk mendapatkan *return* yang besar. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi dorongan terhadap investor institusi untuk lebih berfokus kepada kinerja keuangan (keuntungan) dibandingkan dengan kinerja keberlanjutan.

Berikutnya, rendahnya pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan keberlanjutan didorong karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap pelanggaran terkait isu sosial, lingkungan dan tata kelola. Di Indonesia menurut (Rosalinawati dan Januarti, 2021), masyarakat masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap produk perusahaan sehingga ketika muncul isu - isu keberlanjutan jarang terjadi pemboikotan. Hal ini membuat sebuah celah bagi pemilik institusi untuk tidak melakukan praktik berkelanjutan dan mengarahkan manajemen untuk berfokus kepada keputusan yang bersifat menguntungkan seperti keputusan untuk menaikkan profitabilitas.

### **Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan ESG**

Berdasarkan *output* pada tabel 5 didapatkan hasil jika variabel t value sebesar 0.43 dengan sig 0.671, yang mengindikasikan bahwa ukuran dewan direksi **tidak berpengaruh** terhadap pengungkapan ESG sehingga hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) **ditolak**.

Berdasarkan teori agensi, semakin banyaknya dewan direksi diharapkan meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap aktivitas manajemen sehingga mampu mendorong pengungkapan untuk menekan adanya asimetri informasi. Akan tetapi riset mendapatkan bahwa ukuran direksi tidak berhubungan terhadap pengungkapan ESG sehingga bertolak belakang dengan teori agensi dan sejalan dengan riset (Kolsi dan Muqattash (2021) ; Halid *et al.*, (2022)).

Anggota dewan direksi ditentukan berdasarkan peraturan POJK No. 33 tahun 2014 yang berfokus kepada kuantitas bukan kualitas, salah satunya yang berkaitan dengan kompetensi dalam bidang ESG. Selain itu ESG merupakan isu baru di Indonesia, dimana menurut PWC's 2020 Annual Corporate Directors Survei menyatakan bahwa kurangnya keahlian direksi dalam ESG membuat mereka gagal untuk memahami praktik ESG yang mendorong untuk mengabaikan kinerja keberlanjutan yang berdampak pada pengungkapan informasi keberlanjutan, seperti ESG. Selain itu, Indonesia menerapkan struktur *two-tier system* yang membagi tugas dan kewenangan direksi melalui RUPS sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007. Keputusan direksi harus sejalan dengan Rapat Umum Pemegang Saham, yang membatasi kewenangan dewan direksi.

### **Pengaruh Diversitas Gender terhadap Pengungkapan ESG**

Berdasarkan *output* pada tabel 5 didapatkan hasil jika variabel t value sebesar 1.92 dengan nilai sig 0.059, mengartikan bahwa diversitas gender dalam direksi **tidak berpengaruh** terhadap pengungkapan ESG sehingga hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) **ditolak**.

Teori agensi menjelaskan, keikutsertaan wanita dalam perusahaan akan mendorong adanya komunikasi melalui pengungkapan keberlanjutan agar menekan asimetri informasi atas aktivitas yang dilakukan (Zhang *et al.*, 2013). Akan tetapi riset mendapatkan bahwa diversitas gender tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG sehingga bertolak belakang dengan teori agensi tetapi sesuai pendapat Kolsi dan Muqattash (2021) dan Halid *et al.*, (2022).

Diversitas gender dilihat dari proporsi dewan direksi perempuan dalam suatu jajaran. Masih sedikitnya proporsi direksi perempuan dalam jajaran sehingga belum mampu mempengaruhi pengambilan keputusan (Aprilya dan Kesaulya, 2023). Hal ini diakibatkan, Indonesia didominasi oleh sistem patrilineal. Sistem patrilineal yang begitu kuat mendorong lahirnya sistem patriarki. Sistem patriarki membuat sulitnya perempuan masuk ke dalam jajaran kepemimpinan, salah satunya adalah dewan direksi sehingga perempuan belum dapat berkontribusi secara nyata, termasuk dalam pengambilan keputusan khususnya yang berhubungan dengan laporan berkelanjutan (Setiawan dan Ridaryanto, 2022).

### **Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan ESG**

Berdasarkan *output* pada tabel 5 didapatkan hasil jika variabel *t* value sebesar 2.01 dengan nilai sig 0.048, mengartikan proporsi komisaris independen **berpengaruh positif** terhadap pengungkapan ESG sehingga hipotesis keempat ( $H_4$ ) **diterima**.

Menurut teori agensi, melalui independensi yang dimiliki, komisaris independen dianggap meningkatkan kegiatan monitoring yang lebih efektif terhadap perilaku manajemen dan membatasi adanya tindakan oportunistik manajer dengan mendorong pengungkapan yang lebih banyak termasuk diantaranya ESG (Arayssi *et al.*, 2020). Hal ini mengindikasikan, hipotesis sesuai dengan teori agensi dan didukung beberapa riset diantaranya (Adiasih, *et al.* 2018; Arayssi *et al.*, 2020; Elili, 2023)

Komisaris independen merupakan pihak non afiliasi yang berarti tidak terikat atau memiliki hubungan dengan pihak manapun diperusahaan dan cenderung berfokus kepada kepentingan *stakeholder*. Melalui independensi yang dimiliki, mendorong adanya peningkatan pengawasan yang lebih objektif, serta mampu memberikan saran tanpa memihak siapapun dalam internal perusahaan. Akibatnya kehadiran komisaris independen mampu mengurangi konflik kepentingan serta meningkatkan efisiensi keputusan. Untuk mengurangi adanya konflik kepentingan, maka komisaris independen mendorong direksi untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas, salah satunya mendorong pengungkapan keberlanjutan, seperti ESG (Adiasih, *et al.* 2018).

### **Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan ESG**

Berdasarkan *output* pada tabel 5 didapatkan hasil jika variabel *t* value sebesar 1.00 dengan nilai sig 0.318, mengartikan ukuran komite audit **tidak berpengaruh** terhadap pengungkapan ESG sehingga hipotesis kelima ( $H_5$ ) **ditolak**.

Teori agensi, semakin banyaknya komite audit akan mendorong kualitas pengawasan dalam badan komite audit (Hoitash *et al.*, 2009) sehingga akan mengoptimalkan kinerja komite audit salah satunya untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya, dengan pengungkapan informasi yang lebih luas. Akan tetapi hasil lain didapatkan bahwa komite audit tidak berhubungan terhadap pengungkapan ESG. Sesuai dengan riset yang dikeluarkan oleh Biçer dan Feneir, (2019) ; Haji dan Anifowose, (2016) ; Jimantoro, *et al.*, (2023) mengatakan bahwa ukuran komite audit hanya sebatas jumlah, dimana berdasarkan tabel statistik deskriptif dijelaskan bahwa rata-rata komite audit berjumlah 3,2 yang mengindikasikan sampel penelitian ini memiliki jumlah yang sama, yaitu 3 orang. Ukuran komite audit saat ini masih bersifat formalitas yang berarti hanya mematuhi peraturan yaitu POJK 55. Selain itu, komite audit pada dasarnya hanya dipilih dengan kriteria latar belakang kemampuan keuangan, hal ini mendorong komite audit berfokus kepada pelaporan keuangan saja dibandingkan pelaporan non keuangan.

## **KESIMPULAN DAN KETERBATASAN**

### **Kesimpulan**

Riset ini mengkaji korelasi antara *corporate governance* dengan pengungkapan ESG. Pengungkapan ESG didapatkan melalui *score* yang disediakan oleh terminal Bloomberg dengan rating 0 sampai dengan 100, apabila 0 berarti perusahaan tidak mengungkapkan ESG dan 100 jika perusahaan mengungkapkan data sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Bloomberg. Riset ini berfokus pada perusahaan non keuangan yang terindeks BEI selama tahun 2015 sampai 2021 yang kemudian dilakukan teknik *purposive sampling* dan didapatkan 545 sampel dari 88 perusahaan.

Melalui berbagai tahapan yang dilakukan atas penelitian yang, maka didapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional menyebabkan penurunan pengungkapan ESG yang dibuktikan dengan hasil berpengaruh negatif dan signifikan. Didasarkan atas riset sebelumnya, fenomena ini didukung dengan fokus jangka pendek yang dimiliki oleh institusi serta adanya celah yang diakibatkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap isu keberlanjutan. Di sisi lain, keberadaan komisaris independen mampu meningkatkan pengungkapan ESG. Hal ini didorong dengan adanya sifat independensi yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan pengawasan serta membantu menyeimbangkan pengambilan keputusan agar mengurangi adanya konflik kepentingan, salah satunya melalui pengungkapan ESG. Variabel lain seperti ukuran direksi, diversitas gender dan ukuran komite audit tidak mendukung pengungkapan ESG.

### Keterbatasan

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada riset ini. Keterbatasan riset ini ditunjukkan guna penyempurnaan riset mendatang mengenai topik ini. Keterbatasan dalam riset ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Riset ini menggunakan perusahaan non keuangan di Indonesia sehingga temuan dari riset ini bisa memberikan hasil yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan regulasi dan lingkungan perusahaan.
2. Pengungkapan ESG belum dilakukan oleh semua perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sehingga banyak sampel yang tereliminasi.
3. Riset terkait *corporate governance* dengan variabel yang diaplikasikan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 38,2% pada pengungkapan ESG dan sisanya adalah faktor – faktor lain yang tidak diteliti dalam skripsi ini.

### Saran

Berlandaskan kesimpulan dan keterbatasan di atas, penulis memiliki beberapa usulan untuk perbaikan riset kedepannya sebagai berikut:

1. Riset selanjutnya dapat meneliti kembali topik pengungkapan ESG dengan menambah tahun penelitian atau pembaharuan sektor mengingat topik mengenai ESG saat ini sedang terus berkembang terutama di Indonesia.
2. Riset selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut variabel lain yang mampu mempengaruhi pengungkapan ESG, misalnya dengan menambahkan atribut *corporate governance* seperti jumlah meeting dewan direksi
3. Riset berikutnya dapat menggunakan indeks lain dalam mengukur pengungkapan ESG seperti IDXESGL, MRI, maupun Thomas Router.

**REFERENSI**

- Adiasih, P., Effendy, A., Yuwono, C. D., & Octavia, N. (2018). Do The Earnings Management, Governance, Media Exposure, and Ownership Structure Have Any Effect on ESG Disclosure? *Journal of Economics and Business*, 1(4), 564-576.
- Ahmed Haji, A., & Anifowose, M. (2016). The trend of integrated reporting practice in South Africa: ceremonial or substantive? *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 7(2), 190-224.
- Alfaruq, Nabil (2021, March 30) <https://investor.id/market-and-corporate/indonesia-tertinggal-di-bidang-esg>
- Allegrini, M. and Greco, G. (2013) Corporate Boards, Audit Committees and Voluntary Disclosure: Evidence from Italian Listed Companies. *Journal of Management and Governance*, 17, 187-216.
- Aprilya, C. D., & Kesaulya, F. A. (2023). Pengaruh Board Diversity Terhadap Sustainability Report Disclosure. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 2(1).
- Arayssi, M., Jizi, M., & Tabaja, H. H. (2020). The impact of board composition on the level of ESG disclosures in GCC countries. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 11(1), 137–161.
- Bear, S., Rahman, N., & Post, C. (2010). The impact of board diversity and gender composition on corporate social responsibility and firm reputation. *Journal of business ethics*, 97, 207-221.
- Biçer, A. A., & Feneir, I. M. (2019). The Impact of Audit Committee Characteristics on Environmental and Social Disclosures. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 8(3), 111– 121.
- Birindelli, G., Dell’Atti, S., Iannuzzi, A. P., & Savioli, M. (2018). Composition and activity of the board of directors: Impact on ESG performance in the banking system. *Sustainability (Switzerland)*, 10(12).
- Buallay, A., & Al-Ajmi, J. (2019). The role of audit committee attributes in corporate sustainability reporting: Evidence from banks in the Gulf Cooperation Council. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 249–264.
- Buallay, A. M., & AlDhaen, E. S. (2018). The relationship between audit committee characteristics and the level of sustainability report disclosure. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 11195 LNCS, 492–503.
- Chen, W. (Tina), Zhou, G. (Stephen), & Zhu, X. (Kevin). (2019). CEO tenure and corporate social responsibility performance. *Journal of Business Research*, 95, 292–302.
- Chen, C., Wang, D., & Wang, B. (2021). Interface between context and theory: the application and development of Agency Theory in the Chinese context. *International Journal of Emerging Markets*.
- CNBCIndonesia.com (2021, 5 Mei) Karyawan Ngamuk Soal THR, Bos Pan Brothers Komentar Begini! Diakses pada 31 Mei 2022, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210505163733-17-243468/karyawan-ngamuk-soal-thr-bos-pan-brothers-komentar-begini>
- Cui, J., Jo, H., dan Na, H. (2018). Does corporate social responsibility affect information asymmetry? *Journal of business ethics*, 148, 549-572.
- Denis, D. K., & McConnell, J. J. (2003). International corporate governance. *Journal of financial and quantitative analysis*, 38(1), 1-36.

- Ellili, N. O. D. (2023). Impact of corporate governance on environmental, social, and governance disclosure: Any difference between financial and non-financial companies? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 30(2), 858–873.
- Elkington, J., (1997). *Cannibals with Forks – Triple Bottom Line of 21st-Century Business*. New Society Publishers, Stoney Creek, CT.
- Ghozali, I., dan Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10 (2nd ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Yoga Pratama.
- Guroi, B., & Lagasio, V. (2022). Women board members' impact on ESG disclosure with environment and social dimensions: evidence from the European banking sector. *Social Responsibility Journal*, 19(1), 211-228.
- Halid, S., Mahmud, R., Suffian, M. T. M., & Abdul, R. (2022). Does Firm's Board Affects ESG? Malaysian Evidence. *Management*, 12(1), 131-143.
- Husted, B. W., & Sousa-Filho, J. M. de. (2019). Board structure and environmental, social, and governance disclosure in Latin America. *Journal of Business Research*, 102, 220–227.
- Hoitash, U., Hoitash, R., & Bedard, J. C. (2009). Corporate governance and internal control over financial reporting: A comparison of regulatory regimes. *The accounting review*, 84(3), 839-867.
- Ismail, A. M., Adnan, Z. H. M., Fahmi, F. M., Darus, F., dan Clark, C. (2019). Board Capabilities and the Mediating Roles of Absorptive Capacity on Environmental Social and Governance (ESG) Practices. *International Journal of Financial Research*,
- Investor.id (2021, 30 Maret) Indonesia Tertinggal di Bidang ESG. Diakses pada 1 Juni 2022, dari <https://investor.id/market-and-corporate/242891/indonesia-tertinggal-di-bidang-esg>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jimantoro, C., Maria, K. A., & Rachmawati, D. (2023). MEKANISME TATA KELOLA DAN PENGUNGKAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 19(1), 31-52.
- Kartikarini, N., dan Mutmainah, S. (2013). Analisis pengaruh diversitas gender terhadap voluntary corporate governance disclosure dalam laporan tahunan perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 200-214.
- Kolsi, M. C., & Muqattash, R. (2021). *Board Characteristics, Ownership Structure and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from ADX-Listed Companies CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY View project Accounting Information System Courses Developing a Hybrid Syllabus in the Era of Digitization View project*.
- Khomsiyah.2005. Analysis on the Quality Implementation of Corporate Governance Disclosure. Dissertation. Faculty of Economics, University of Gajah Mada. Yogyakarta
- Kompas.com (2020, 15 Oktober) Jejak Hitam PT Hanson International, Manipulasi Laporan Keuangan 2016. Diakses pada 31 Mei 2022, dari <https://money.kompas.com/read/2020/01/15/160600526/jejak-hitam-pt-hanson-international-manipulasi-laporan-keuangan-2016?page=all>
- Market.bisnis.com ( 2021, 20 Desember) Dari Sri Kehati hingga ESG Quality 45 IDX, Kenali 4 IndeksBerbasisESGDIndonesia.Diakses pada 12 Juni 2023, dari <https://market.bisnis.com/read/20211220/7/1479522/dari-sri-kehati-hingga-esg-quality-45-idx-kenali-4-indeks-berbasis-esg-di-indonesia>.

- Mediaindonesia.com. (2019, 16 Juli). Panja Limbah DPR Temukan Limbah B3 di Pabrik Mie Instan Medan. Diakses pada 31 Mei 2022, dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/247364/panja-limbah-dpr-temukan-limbah-b3-di-pabrik-mie-instan-medan>
- Na, K., & Hong, J. (2017). CEO Gender And Earnings Management. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 33(2), 297–308.
- Ningrum, A. P., dan Prihatiningtias, Y. W. (2015). Pengaruh tata kelola korporat terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (studi pada perusahaan yang terdaftar di perhitungan indeks saham sri-kehati tahun 2010-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(1).
- Persons, O.S.(2009):Audit committee characteristics and earlier voluntary ethics disclosure among fraud and no-fraud firms. *Int. J. Discl. Gov.* 6(4), 284–297 (2009)
- PWC's 2023 Annual Corporate Directors Survey. PWC 2020
- Qa'dan, M. B. A., dan Suwaidan, M. S. (2019). Board composition, ownership structure and corporate social responsibility disclosure: the case of Jordan. *Social Responsibility Journal*, 15(1), 28-46.
- Rahmadani, F., Adrianto, F., & Alfarisi, M. F. (2023). Is it Corporate Governance, Industry, and Profitability Matter on Esg Performance? Evidence from Indonesian Companies. *Journal of Social Research*, 2(3), 804-817.
- Rosalinawati, N. M., Dan Januarti, I. (2021). *Pengaruh Kepemilikan Saham Terhadap Environmental, Social, Governance (ESG) Disclosure* (Doctoral dissertation, UNDIP-Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Sakawa, H., Watanabel, N., Duppati, G., & Faff, R. (2021). Institutional ownership and corporate risk-taking in Japanese listed firms. *Applied Economics*, 53(16), 1899-1914.
- Setiawan, E. M., dan Ridaryanto, P. (2022). Analisis Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Kualitas Sustainability Report. *BALANCE: Jurnal Akuntansi*, 19(1)126–149
- Sekaran, U., dan Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian Edisi 6 Buku 2*
- Singh, V., Terjesen, S., dan Vinnicombe, S. (2008). Newly appointed directors in the boardroom: How do women and men differ? *European management journal*, 26(1), 48-58.
- Scholten, B. (2008). A note on the interaction between corporate social responsibility and financial performance. *Ecological economics*, 68(1-2), 46-55.
- Suttipun, M. (2021). The influence of board composition on environmental, social and governance (ESG) disclosure of Thai listed companies. *International Journal of Disclosure and Governance*, 18(4), 391–402.
- Utama, S., Siregar, S. V., & Simanjuntak, J. (2022). *Tata Kelola Korporat di Indonesia: Teori, Prinsip, dan Praktik. Jakarta: Salemba Empat*
- Velte, P. (2017). Does ESG performance have an impact on financial performance? Evidence from Germany. *Journal of Global Responsibility*, 8(2), 169–178.
- Zaid, M. A., Abuhijleh, S. T., dan Pucheta-Martínez, M. C. (2020). Ownership structure, stakeholder engagement, and corporate social responsibility policies: The moderating effect of board independence. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(3), 1344-1360.
- Zhang, J. Q., Zhu, H., dan Ding, H. B. (2013). Board composition and corporate social responsibility: An empirical investigation in the post Sarbanes-Oxley era. *Journal of business ethics*, 114, 381-392.